

KINERJA APARATUR PADA BADAN PERPUSTAKAAN KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Deti Apriani¹, Zulkarnaen², Joko Suhartono³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Kinerja aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain: 1) Akuntabilitas, yang memperlihatkan bahwa tingkat konsistensi kejelasan status pembagian tugas pokok antara bidang dengan Unit pelayanan Perpustakaan (UPT. Perpustakaan) belum optimal, sehingga adanya kesulitan dalam menentukan arah kebijakan, sampai pada pelaksanaan program kegiatan, 2) Responsibilitas, yang memperlihatkan bahwa belum optimalnya peran masyarakat dalam pemberdayaan perpustakaan, masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang terampil di bidang perpustakaan dan kearsipan; 3) Responsivitas, yang memperlihatkan bahwa masih adanya keluhan dari masyarakat tentang pelayanan informasi dan masih terbatasnya sarana, mulai dari peralatan/perlengkapan, hingga ke ruang penyimpanan yang masih menyatu penggunaannya dengan ruang kerja.

Kata Kunci : Kinerja, Aparatur, Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Asisten, Biro, Dinas, Badan dan Kantor. Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Bidang dan Sub Bidang.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tersebut, Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

¹ PNS – Kota Pontianak

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

Sebagai upaya dalam mengantisipasi tuntutan ke depan menuju kondisi yang diinginkan Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat menetapkan visi yaitu terwujudnya perpustakaan dan kearsipan sebagai pusat ilmu pengetahuan dan informasi yang handal, dengan misi yaitu melestarikan karya cetak dan karya rekam sebagai hasil budaya bangsa serta meningkatkan kegemaran membaca, melaksanakan tertib pengolahan arsip serta memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur, menyelamatkan dan melestarikan arsip sebagai memori kolektif bangsa. Oleh karena itu kinerja Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat menjadi sangat penting untuk dievaluasi sejauh mana pegawai tersebut telah melaksanakan tugas-tugasnya. Namun demikian berdasarkan pengamatan pada Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat tentang kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dapat diketahui bahwa, sumber yang terjadi berkaitan dengan kinerja aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat tiap masing-masing bidang menunjukkan bahwa masih ada program kerja yang sudah menjadi Rencana Kerja (Renja) belum terealisasi secara maksimal. Fenomena tersebut antara lain:

1. Bidang Perpustakaan, sasarannya adalah terkelolanya koleksi deposit daerah, dengan kinerja program yaitu pelestarian dan pengelolaan kekayaan. Kemudian realisasi programnya belum terlaksananya fumigasi koleksi deposit
2. Bidang Dinamis, sasarannya adalah pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah, dengan kinerja program perbaikan sistem administrasi kearsipan. Kemudian realisasi program belum terlaksananya sosialisasi kearsipan di lingkungan SKPD Kabupaten/Kota dan swasta
3. Bidang Arsip Statis, sasarannya adalah terselamatkannya arsip statis daerah, dengan kinerja program peningkatan kualitas pelayanan informasi. Kemudian realisasi program belum tersedianya sarana layanan
4. Bidang Sistem, sasarannya adalah terbinanya sistem pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dengan kinerja program bina sistem dan pengendalian perpustakaan. Kemudian realisasi program belum terlaksananya penyuluhan dalam bentuk bintek langsung kepada unit-unit perpustakaan.

Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat sebagai suatu badan dalam melaksanakan misi yang diembannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai aktor. Dalam hal ini terdapat hubungan yang erat antara kinerja pegawai dengan tugas dan fungsi Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu tidak bisa terlepas dari kinerja sesuai dengan visi dan misi Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengenai aspek kinerja aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan Rencana Kerja (Renja).

3. Perumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini : Bagaimana kinerja aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan rencana kerja (Renja).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kinerja

Menurut Dwiyanto (2002:55), kinerja adalah: "suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan tugas dan fungsi, dengan indikator:

- a. Acuan pelaksanaan tugas yang digunakan aparat birokrasi;
- b. Tindakan yang dilakukan aparat;
- c. Prioritas kepentingan dari aparat dalam melaksanakan tugas.

Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 menyebutkan bahwa agar terselenggaranya *good governance* di Indonesia diperlukan akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan tersebut merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih, bertanggungjawab, dan transparan. Dengan demikian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan terkontrol dan selalu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Pengertian kinerja menurut Prawirosentono (2004:12) adalah sebagai berikut : Istilah kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Sementara itu Ruky (2002: 25) memberikan pengertian kinerja atau *performance* adalah: "sebagai hasil kerja seseorang pekerjaan atau keseluruhan, di mana hasil kerja tersebut harus ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang ditentukan)." Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa kinerja berhubungan dengan bagaimana melakukan suatu pekerjaan dan menyempurnakan hasil pekerjaan berdasarkan tanggungjawab namun tetap mentaati segala peraturan-peraturan, moral maupun etika.

Sejalan dengan pengertian di atas, Bernardin dan Rusell (1998 : 379) menyebutkan bahwa : "*Performance is defined as the record of out comes product on a specified job function or activity during a specified time period* (Kinerja merupakan tingkat pencapaian/rekor produksi akhir pada suatu aktivitas organisasi atau fungsi kerja khusus selama periode tertentu)". Lebih lanjut Darmawan (2005:32) memberikan pendapatnya tentang pengertian kinerja adalah "hasil kerja yang dapat dicapai oleh aparatur, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika."

Dari beberapa definisi tentang kinerja tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa kinerja atau *performance* merupakan hasil kerja yang secara konkrit dapat ditunjukkan oleh aparatur sesuai dengan tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang diberikan kepadanya. Hasil dari kinerja dimaksud dapat diukur dalam berbagai kriteria, yaitu dalam dimensi kuantitas (jumlahnya) dan kualitas (mutunya). Sedang standar yang digunakan untuk mengukurnya dapat berupa rencana kerja yang telah ditentukan, peraturan perundang-undangan yang harus dipedomani, norma-norma serta nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di dalam organisasi tersebut.

2. Pengukuran dan Penilaian Kinerja

Cakupan dan cara mengukur indikator kinerja sangat menentukan apakah suatu organisasi publik dapat dikatakan berhasil atau tidak. Menurut Keban, (2005:118) bahwa "ketepatan pengukuran seperti cara atau metode pengumpulan data untuk mengukur kinerja juga sangat menentukan penilaian akhir kinerja". Whittaker (dalam Hasanusi, 2005:78) menyebutkan bahwa "pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas". Pengukuran kinerja mempunyai makna ganda, yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja, di mana untuk melaksanakan kedua hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas, sehingga suatu pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti-bukti atau indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja

kegiatan, yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatannya. Program dan kegiatan merupakan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan strategis Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Donald dan Lawton (dalam Keban, 2005:90) menyatakan bahwa “penilaian kinerja organisasi dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu dan penilai tersebut juga dapat dijadikan input bagi perbaikan dan peningkatan kinerja aparatur”. Dwiyanto (2002: 117) menyatakan bahwa sistem penilaian kinerja aparatur harus disusun dan diimplementasikan dengan suatu 1) prosedur formal standar; 2) berbasis pada analisis jabatan; dan 3) hasilnya didokumentasikan dengan baik; 4) penilai yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang dapat dipertanggung jawabkan. Meskipun penilaian kinerja telah berkembang dengan pesat, akan tetapi penggunaan penilaian kinerja dalam organisasi publik belum berkembang sebagaimana yang telah terjadi dalam sektor swasta. Berdasarkan data empiris menunjukkan bahwa penilaian terhadap kinerja di organisasi publik belum merupakan tradisi yang populer (Keban, 2005:99), dan bahkan terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai kriteria kinerja pelayanan publik (Dwiyanto, 2006:120). Perbedaan pendapat tersebut disebabkan tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya sangat kabur akan tetapi juga bersifat multi dimensional.

Menurut LAN (1999:54), pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001:76) menyatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

Lebih lanjut Mardiasmo (2001:79) menjelaskan bahwa pada umumnya sistem ukuran kinerja dipecah dalam lima kategori sebagai berikut:

1. Indikator *input*, mengukur sumber daya yang diinvestasikan dalam suatu proses, program, maupun aktivitas untuk menghasilkan keluaran (*output* maupun *outcome*).
2. Indikator *output* adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan / atau non fisik.
3. Indikator *outcome*, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output (efek langsung) pada jangka menengah.
4. Indikator *benefit*, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator *outcome*.
5. Indikator *impact* memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari benefit yang diperoleh.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Beberapa pandangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi publik, yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu, dapat ditemui dari berbagai kepustakaan yang berusaha menggambarkan kinerja organisasi publik. Suatu organisasi, terlepas dari bagaimana bentuknya organisasi tersebut, apapun tujuan yang akan dicapai, selalu mengharapkan sasaran/target yang telah ditetapkan akan dapat tercapai semaksimal mungkin. Untuk mencapai target tersebut, banyak faktor yang dapat mempengaruhinya.

Dwidjoesastro (2002: 28), menyatakan bahwa “organisasi bukanlah sistem yang tertutup (*close system*) melainkan organisasi tersebut akan selalu dipaksa untuk memberi tanggapan atas rangsangan yang berasal dari lingkungannya”. Pengaruh lingkungan dapat dilihat dari dua segi: *pertama*, lingkungan eksternal yang umumnya menggambarkan kekuatan yang berada di luar organisasi seperti faktor politik, ekonomi dan sosial, *kedua* adalah lingkungan internal yaitu faktor-faktor dalam organisasi yang menciptakan iklim organisasi dimana berfungsinya kegiatan mencapai tujuan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Higgins (dalam Hasanusi 2005:114) menyatakan bahwa “ada dua kondisi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu kapabilitas organisasi yaitu konsep yang dipakai untuk menunjuk pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor strategik yaitu kekuatan dan kelemahan”. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategik dalam mencapai sasarannya; sedangkan kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Kedua faktor ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Faktor yang perlu diperhitungkan dalam melihat kemampuan internal organisasi antara lain : struktur organisasi, sumberdaya baik dana maupun tenaga, lokasi, fasilitas yang dimiliki, integritas seluruh karyawan dan integritas kepemimpinan. Kondisi yang kedua adalah lingkungan eksternal, yang terdiri atas dua faktor strategik, yaitu peluang dan ancaman atau tantangan. Peluang sebagai situasi dan faktor-faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai atau bahkan bisa melampaui pencapaian sasarannya; sedangkan ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Dalam mengamati lingkungan eksternal, ada beberapa sektor yang peka secara strategik, artinya bisa menciptakan peluang, atau sebaliknya merupakan ancaman. Perkembangan teknologi misalnya, peraturan perundang-undangan, atau situasi keuangan, dapat saja memberi keuntungan atau kerugian bagi organisasi.

Sementara itu faktor-faktor yang mendukung keberhasilan akhir suatu organisasi dapat ditemukan dalam empat kelompok umum, yaitu: (1) Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi; (2) karakteristik lingkungan, mencakup dua aspek lingkungan ekstern dan lingkungan internal, yang dikenal sebagai iklim organisasi meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja (contoh: pekerja sentris, orientasi pada prestasi); (3) karakteristik pekerja, perhatian harus diberikan kepada perbedaan individual antara para pekerja dalam hubungannya dengan efektivitas. (4) kebijakan dan praktek manajemen, peranan manajemen dalam prestasi organisasi, meliputi variasi gaya, kebijakan dan praktek kepemimpinan dapat memperhatikan atau merintangai pencapaian tujuan. (Siagian, 2004: 78).

Gogin dan Joedono (dalam Hasanusi, 2005:66) bahwa struktur organisasi, sumber daya manusia dan finansial berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Ketiga faktor tersebut bukan merupakan faktor yang berdiri sendiri. Untuk lebih jelasnya, maka dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi merupakan unsur yang sangat penting karena struktur organisasi akan menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi dialokasikan di dalam organisasi. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara orang melaksanakan tugasnya (bekerja) dalam organisasi
- b. Sumber Daya Manusia menempati kedudukan yang lebih tinggi dan merupakan faktor yang sangat menentukan untuk tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi.
- c. Finansial merupakan salah satu sumber daya yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik, karena finansial sebagai biaya atau cost dan anggaran atau budget. Biaya merupakan sejumlah uang yang disediakan dan dipergunakan secara langsung untuk mencapai tujuan kegiatan di dalam suatu proses kelembagaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif terhadap Pada Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat. Subjek penelitian adalah pegawai yang bekerja di Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari: Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang Perpustakaan, Kepala Bidang Arsip Dinamis, Kepala Bidang Arsip Statis dan Kepala Bidang Bina Sistem dengan menggunakan teknik bertujuan (*purposive*). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

1. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat pelaksanaan misi yang pertama yaitu menerapkan kebijakan dalam melestarikan karya cetak dan karya rekam sebagai hasil budaya bangsa serta meningkatkan kegemaran membaca. Kewenangan dalam bidang perpustakaan, bidang kearsipan, bidang arsip dinamis, bidang arsip statis dan bidang bina sistem yang telah diberikan kepada badan, dilaksanakan dengan menerapkan berbagai kebijakan antara lain: kebijakan eksternal berupa perundang-undangan tentang perpustakaan dan kearsipan baik berupa kebijakan pusat maupun daerah (Provinsi), sedangkan kebijakan internal yaitu berupa kebijakan yang sarannya melalui badan itu sendiri antara lain Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang berhubungan dengan kebijakan tentang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi.

Keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan tidak terlepas pada badan itu sendiri di dalam menetapkan satu cara melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Atas dasar itu semua di dalam pencapaian sasaran dan tujuan Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan kebijakan sebagai landasan di dalam menentukan arah tercapainya sasaran dan tujuan secara tepat dan kemudian kebijakan tersebut dituangkan dalam rencana strategis yang secara global dapat mencerminkan semua aktivitas/kegiatan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, dan telah sesuai dengan cakupan bidang tugas yang menjadi garapan pada masing-masing bidang dalam organisasi, sehingga dengan penetapan kebijakan yang ada pada unit dapat menetapkan sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara melalui Kepala Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat diperoleh keterangan bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2008, maka kewenangan aparatur menjadi sangat terbatas, sehingga dengan kewenangan yang terbatas tersebut tentu berpengaruh terhadap kinerja Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan. Penilaian dalam hal ini akan lebih tepat manakala indikator kinerja aparatur dalam melaksanakan bidang tugas masing-masing sesuai program ditetapkan berdasarkan indikator outcome. Hal tersebut kiranya dapat merupakan wacana dan masukan bagi pihak-pihak terkait yang pada akhirnya mengarah pada suatu kesepakatan bersama terhadap indikator yang paling ideal yang akan digunakan dalam penilaian program, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) setiap Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dibentuknya Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana pernyataan Kepala Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, bahwa dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah sedang melaksanakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan tujuan untuk menyempurnakan sistem kelembagaan aparatur pemerintah daerah, manajemen pemerintahan umum dan pembangunan agar efisien dan efektif di

lingkungan pemerintah daerah yang meliputi kegiatan penataan kembali struktur organisasi, mekanisme kerja, dan peraturan perundang-undangan yang memadai guna menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya kesesuaian antara tugas dan fungsi, struktur organisasi dan kualifikasi maupun jumlah pegawai, serta terbangunnya hubungan kerja antar organisasi pemerintah dan organisasi masyarakat. Kemudian untuk melaksanakan tugas Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan misi meningkatkan terlaksananya pemerataan pembangunan daerah di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, maka salah satunya dibentuk Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat sebagai pengembangan dari masing-masing bidang, termasuklah bidang perpustakaan, bidang arsip dinamis, bidang arsip statis dan bidang bina sistem.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perpustakaan, bahwa: kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang perpustakaan belum semuanya mengarah kepada meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan dan lembaga kearsipan berdasarkan kebutuhan lingkungan, terlaksananya akuisisi, pengelolaan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan dan lembaga kearsipan menyelenggarakan, menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan bentuk karya cetak dan karya rekam yang terbit di wilayah Kalimantan Barat serta berkembangnya budaya gemar membaca.

Sejalan dengan hal tersebut juga diakui oleh Kepala Bidang Arsip Dinamis dan Bidang Arsip Statis Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, bahwa tertib pengelolaan arsip daerah dilakukan sejak dari penarikan, pengolahan, hingga ke penyimpanan, dengan melakukan pendataan dan penataan dokumen atau arsip daerah, seperti pendataan arsip pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah, jumlah arsip in aktif yang diolah dan pengolahan arsip daerah sebagai aset badan. Di samping itu dilakukan penilaian dan penyusutan arsip.

Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Sistem Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, diperoleh keterangan bahwa bidang bina sistem dalam melaksanakan tugas masih berhadapan dengan berbagai kendala dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan yang sistematis dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan dan kearsipan. Hal tersebut terlihat dari belum maksimalnya terlaksananya peningkatan sumber daya aparatur perpustakaan dan kearsipan, jumlah arsiparis dan pengelola arsip yang berkualitas masih terbatas, rendahnya jumlah peserta sosialisasi arsip masuk desa, arsip sekolah, bimbingan teknik arsip kelurahan dan peserta penyuluhan langsung arsip masuk desa serta jumlah pembinaan administrasi kearsipan. Oleh karena itu banyaknya jumlah dan jenis perpustakaan dan lembaga kearsipan yang harus dibina.

Hasil wawancara tersebut, dapat ditelaah bahwa kinerja bidang – bidang pada Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka membina, mengembangkan dan mendayagunakan semua jenis perpustakaan dan lembaga kearsipan belum tercapai secara maksimal. Hal tersebut terlihat belum sepenuhnya peningkatan kualitas pengelolaan yang sistematis dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan dan kearsipan. Sementara program pengembangan ilmu teknologi di perpustakaan dan juga program pengembangan perpustakaan model di daerah perbatasan belum teralisasi sebagai bukti daerah memperhatikan masyarakat pedalaman dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat Kalimantan Barat.

Peningkatan efisiensi dan efektivitas program serta mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah-ubah sangat cepat saat ini, maka Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan, dimana perubahan tersebut harus dibuat dan disusun dalam suatu tahapan dan konsisten serta berkelanjutan,

sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Kinerja aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat selain menggambarkan program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perlu strategi pemecahan masalah yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat.

Akuntabilitas kinerja pegawai bersifat umpan balik bagi pegawai itu sendiri, misalnya ada pegawai yang kurang mampu dalam melaksanakan tugasnya, maka pihak atasan harus mencari solusi bagaimana cara memperbaiki pegawai tersebut agar dapat melaksanakan tugas tersebut. Sebagai upaya dalam mengantisipasi perbaikan kinerja aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat menetapkan visi yaitu terwujudnya perpustakaan dan kearsipan sebagai pusat ilmu pengetahuan dan informasi yang handal, dengan misi yaitu melestarikan karya cetak dan karya rekam sebagai hasil budaya bangsa serta meningkatkan kegemaran membaca, melaksanakan tertib pengolahan arsip serta memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur, menyelamatkan dan melestarikan arsip sebagai memori kolektif bangsa. Oleh karena itu kinerja aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat menjadi sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana aparatur tersebut telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik di masing-masing bidang.

Berdasarkan observasi tentang kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, menunjukkan bahwa kualitas sumber daya aparatur tersebut baru sampai pada tahap pencapaian target peserta dan penyampaian materi, sedangkan hasil (outcome) dari kegiatan tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Sebagaimana pernyataan dari Kepala Bidang Perpustakaan, diperoleh keterangan bahwa: konsistensi pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan yaitu terkelolanya koleksi deposit daerah dengan melakukan pelestarian pengelolaan kekayaan budaya, seperti pelaksanaan fumigrasi koleksi deposit, pelaksanaan huting terbitan daerah, pengolahan terbitan daerah dan pelaksanaan alih media/digitalisasi terbitan daerah.

Konsistensi kinerja aparatur masing-masing bidang pada Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan pada akhir suatu periode tertentu. Berdasarkan keterangan melalui Kepala Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat bahwa konsistensi kinerja aparatur masing-masing bidang yang dilaksanakan meliputi indikator kinerja input, output, outcome, benefits dan impacts. Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2012, telah ditetapkan program sebanyak 12 dan 58 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, diperoleh keterangan bahwa acuan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang berdasarkan rencana program dan kegiatan indikatif. Adapun program yang dilaksanakan masing-masing bidang antara lain:

1. Bidang Perpustakaan melaksanakan program pelestarian dan pengelolaan kekayaan budaya, dengan indikator kinerja program pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, penerbitan literatur sekunder (katalog induk, bibliografi daerah dan daftar KCKR) dan pelaksanaan perbaikan koleksi deposit serta pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan.
2. Bidang Arsip Dinamis melaksanakan program perbaikan sistem administrasi kearsipan dan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan, peningkatan kualitas pelayanan informasi, dengan indikator kinerja program sosialisasi kearsipan dilingkungan SKPD kabupaten/kota dan swasta, menyusun hasil kajian sistem administrasi kearsipan, pelaksanaan penilaian, penyusutan dan pemusnahan arsip, pelaksanaan perawatan/pemeliharaan arsip inaktif dan melaksanakan apresiasi kearsipan.

3. Bidang Arsip Statis melaksanakan program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, peningkatan kualitas pelayanan informasi, dengan indikator program pelaksanaan penarikan dan penataan arsip statis, merawat dan melaksanakan restorasi arsip, melaksanakan penelusuran dan inventarisasi arsip statis di lingkungan badan/dinas, melaksanakan akuisisi arsip statis daerah, menyusun daftar arsip statis berdasarkan JIKN, mengopersikan mobil layanan sadar arsip, menyediakan sarana layanan informasi arsip dan memelihara peralatan jaringan sistem informasi kearsipan.
4. Bidang Bina Sistem melaksanakan program bina sistem dan pengendalian perpustakaan, pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia perpustakaan, dengan indikator program mendata dan melaksanakan pemberian Nomor Pokok perpustakaan (NPP), melaksanakan penyuluhan dalam bentuk bimtek langsung kepada unit-unit perpustakaan, melaksanakan evaluasi monitoring pelaksanaan teknis operasional perpustakaan di kabupaten/kota, melaksanakan rakor perpustakaan dan kearsipan, dan menyelenggarakan duklat teknis perpustakaan (SD, SLTP dan SLTA).

Kemudian berdasarkan dokumentasi Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, diperoleh data yang berkaitan dengan penelitian bahwa prioritas utama dari aparaturnya bidang, mengarah kepada kegiatan pokok atau kegiatan indikatif, karena masing-masing bidang mempunyai prioritas kegiatan pokok, seperti:

- a. Bidang Perpustakaan mempunyai prioritas utama melestarikan karya cetak dan karya rekam sebagai hasil budaya bangsa dengan melakukan pengelolaan terhadap koleksi deposit daerah, mempublikasikan dan memasyarakatkan perpustakaan
- b. Bidang Arsip Dinamis, mempunyai prioritas utama melaksanakan tertib pengolahan arsip serta memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparaturnya dengan melaksanakan tertib pengelolaan arsip daerah sejak dari penarikan, pengolahan hingga ke penyimpanan.
- c. Bidang Arsip Statis, mempunyai prioritas utama menyelamatkan dan melestarikan arsip sebagai memori kolektif bangsa dengan melaksanakan akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan dan pelayanan publik dalam rangka pengelolaan arsip statis, dengan melakukan tindakan menyelamatkan arsip statis daerah dan menyediakan layanan jasa arsip.
- d. Bidang Bina Sistem, mempunyai prioritas utama membina, mengembangkan dan mendayagunakan semua jenis perpustakaan dan lembaga kearsipan dengan meningkatkan SDM perpustakaan dan kearsipan serta melakukan pembinaan sistem pengelolaan perpustakaan dan kearsipan.

Lebih lanjut Kepala Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, diperoleh keterangan bahwa pengukuran kinerja terhadap prioritas utama dari aparaturnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran penilaian ini digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Adapun sasaran yang telah ditetapkan sebagai pengukuran kinerja aparaturnya badan meliputi:

1. Terkelolanya koleksi deposit daerah dalam bentuk karya cetak dan karya rekam yang terbit di wilayah Kalimantan Barat serta berkembangnya budaya gemar membaca
2. Tertib pengelolaan arsip daerah sejak dari penarikan, pengolahan hingga ke penyimpanan
3. Terlaksananya akuisisi, pengelolaan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan dan lembaga kearsipan
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan dan lembaga kearsipan
5. Terwujudnya masyarakat gemar membaca dan sadar informasi serta terlaksananya sistem pelayanan perpustakaan yang prima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Arsip Dinamis dan Arsip Statis, diperoleh keterangan bahwa tindakan aparatur dalam menghadapi masalah pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai bentuk pengukuran dan evaluasi kinerja aparatur di Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, sampai saat ini belum dapat diungkapkan secara sistematika, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya yang menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda.

Berdasarkan dari hasil wawancara melalui beberapa sumber data, dapat ditelaah bahwa akuntabilitas kinerja aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tugas-tugas umum pemerintahan belum dapat ditetapkan indikator keberhasilannya, mengingat Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi acuan pembuatan indikator pada umumnya masih dalam proses penyusunan, sehingga capaian kinerja yang dilaporkan cenderung lebih menitikberatkan pada sejauhmana program dan kegiatan yang telah membawa manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi yang ada, mengenai akuntabilitas kinerja aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, bahwa keberhasilan realisasi suatu kegiatan terkait dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu ada kesulitan dari Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai satu tahun anggaran. Karena dampak dari suatu kegiatan ada yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dari program tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut dan diperkuat dengan studi dokumentasi melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 450 Tahun 2003 pasal 5 menegaskan bahwa pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

- a. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok kegiatan
- b. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Suatu organisasi dikatakan efektif manakala organisasi itu dapat mencapai tujuannya secara optimal. Akuntabilitas kinerja aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat akan dilihat dari tingkat pemahaman pegawai terhadap tujuan organisasi dan uraian tugas dalam rangka penyusunan rencana/program dan pelaksanaan kegiatan serta terciptanya kepuasan kerja pegawai.

Berhubungan dengan indikator pemahaman aparatur terhadap tujuan organisasi dan uraian tugas dan fungsi, berikut ini akan ditampilkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang pada Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat menyangkut pemahaman terhadap tujuan organisasi dan uraian tugas organisasi, yaitu sebagian pegawai yang tahu dan paham akan tujuan organisasi, disamping itu setiap

tugas yang diberikan oleh Kepala Badan sebenarnya belum begitu kami pahami, oleh karena itu dalam pelaksanaannya kami sering menemui kesulitan, dan jarang sekali pimpinan memberikan solusi pemecahannya, yang kami lakukan kemudian untuk menyelesaikan pekerjaan adalah melakukan konsultasi dengan atasan dan kepala bidang lain serta berkomunikasi dengan rekan sekerja. Hal inilah yang sering mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian tugas di kantor.

Demikian juga apa yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Perpustakaan, diperoleh keterangan bahwa tingkat pemahaman staf terhadap tugas-tugas yang diberikan rata-rata relatif kurang, seperti kurang pemahannya dalam melaksanakan tugas perumusan program kerja di bidang perpustakaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan. Meskipun dalam pelaksanaannya telah diberikan arahan dan penjelasan, namun selalu saja beberapa staf mendapatkan kesulitan, sehingga tugas-tugas yang diberikan seringkali mengalami keterlambatan.

Dengan demikian tingkat pemahaman dari pegawai Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat terhadap apa yang menjadi beban tugasnya belum sepenuhnya dipahami dengan baik. Kekurang-pahaman pegawai terhadap tujuan serta tugas organisasi jelas akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja aparatur. Untuk mencapai kinerja aparatur minimal harus dimulai dengan mengetahui kekurang-pahaman pegawai terhadap tujuan organisasi bisa mengakibatkan kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Kondisi tersebut secara tidak langsung akan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas sehingga mengakibatkan organisasi menjadi lamban.

B. Responsibilitas Kinerja

Responsibilitas merupakan kemampuan dan keandalan petugas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diserahkan kepadanya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; seperti menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, tidak merugikan, dan berani menanggung atau memikul resiko atas keputusan atau tindakan yang diambilnya. Responsibilitas ini akan dilihat dari apakah pelaksanaan kegiatan organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan organisasi, yang diukur dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh aparat Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat. Responsibilitas kinerja aparat Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat dari pelaksanaan peningkatan Sumber daya Aparatur perpustakaan dan kearsipan yang mengutamakan terpeliharanya mutu pelayanan yang terus menerus.

Sebagai tanggungjawab aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas berdasarkan kepada jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan tugas dan fungsi berarti bahwa tindakan korektif yang harus diambil atau ditindak-lanjuti dari masing-masing bidang akan mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan. Hal ini akan memberikan akibat negatif pada organisasi yang dikarenakan suatu persoalan menjadi terhambat penyelesaiannya.

Jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan merupakan jumlah siklus kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Kepala Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat sebagai mana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2008 melalui dengan menentukan target yang dihasilkan, baik target pencapaian pekerjaan, penyusunan laporan dan pekerjaan rutin yang sudah ditetapkan. Kondisi yang diharapkan aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat adalah dapat terpenuhinya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih meningkat sesuai dengan beban dan tanggungjawab aparat Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat dengan

cara meningkatkan kemampuan kapasitas dan fasilitas yang dimiliki sesuai dengan kemampuan aparatur yang profesional.

Hasil wawancara melalui Kepala Bidang Perpustakaan, menunjukkan bahwa kemampuan aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengenai pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan belum sesuai dengan harapan. Artinya hasil kerja yang dilakukan oleh aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan kegiatan di bidang perpustakaan, seperti pelestarian pengelolaan kekayaan budaya, permasyarakatan perpustakaan dan budaya baca.

Responsibilitas kinerja aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat ditentukan oleh kemampuan dari aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat seperti :

- a. Kecepatan (*Time Reduction*), maksudnya kecepatan dalam memberikan respon atau reaksi terhadap pelayanan masyarakat.
- b. Ketepatan yaitu keakuratan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di masing-masing bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi. Untuk itu aparat Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat harus mampu dan siap memberikan bantuan secara optimal kepada masyarakat dengan dukungan fasilitas dan peralatan bantuan yang diperlukan.
- c. Kompetensi aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat yang mampu dan trampil, karena kegiatan di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi adalah kegiatan dalam melaksanakan pelayanan informasi di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi. Untuk itu aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat harus mampu dan trampil untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan informasi dan administrasi.

Pemanfaatan waktu kerja merupakan tingkat sejauhmana suatu kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat diselesaikan pada waktu yang dikehendaki dengan memperhatikan koordinasi output lain serta waktu yang tersedia untuk kegiatan lain. Pemanfaatan waktu ini dirumuskan dan ditetapkan oleh Kepala Badan dengan penjabaran penggunaan waktu pelayanan informasi, penggunaan waktu penyusunan laporan dan penggunaan waktu untuk pekerjaan rutin yang bersifat temporer yang harus dilakukan oleh masing-masing aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat.

Memperhatikan tugas-tugas pokok operasional Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat di dalam melaksanakan pelayanan informasi, baik di bidang perpustakaan, kearsipan maupun dokumentasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing seperti pengelolaan koleksi deposit daerah dalam bentuk karya cetak dan karya rekam yang terbit di wilayah Kalimantan Barat serta berkembangnya budaya gemar membaca, pengelolaan arsip daerah sejak dari penarikan, pengolahan hingga ke penyimpanan, melaksanakan akuisisi, pengelolaan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan dan lembaga kearsipan serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan dan lembaga kearsipan.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara kepada Kepala Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, diperoleh keterangan bahwa responsibilitas kinerja aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok terhadap kemampuan aparatur dari bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi berdasarkan parameter pelaksanaan pelayanan administrasi dan informasi yang berkaitan dengan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan dan lembaga kearsipan

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kepala bidang pada Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, diperoleh keterangan bahwa pemahaman aparatur terhadap tugas-tugas yang diberikan relatif masih kurang sehingga sering mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan. Upaya-upaya yang dilakukan adalah mengirim pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) dan mempersiapkan pegawai tertentu untuk mengikuti kursus/pelatihan teknis.

Dari hasil wawancara melalui beberapa sumber tersebut, dapat ditelaah bahwa tingkat pemahaman pegawai terhadap tujuan organisasi serta pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat. Kekurang-pahaman pegawai terhadap tujuan organisasi mengakibatkan tidak dapat terciptanya mekanisme kerja yang baik. Mekanisme kerja yang buruk jelas berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Kemudian kekurang-pahaman pegawai dalam melakukan tugas dan fungsi jelas akan berpengaruh juga terhadap kinerja organisasi, karena kekurang-pahaman ini akan berimbas pada proses pencapaian tujuan organisasi.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perpustakaan dan Bidang Bina Sistem, diperoleh keterangan bahwa, ukuran daya tanggap aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berorientasikan kepada pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan organisasi kepada seluruh pegawai terutama kepada staf dalam level yang terbawa, demikian juga halnya terhadap kekurang-pahaman pegawai terhadap uraian tugas pokok organisasi. Namun demikian kekurang-pahaman pegawai terhadap uraian tugas lebih banyak disebabkan oleh faktor rasa kurang peduli dari pegawai Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, hal ini dapat dibuktikan dengan perilaku pegawai yang lebih senang menghabiskan waktu di luar jam kerja daripada berusaha meningkatkan kemampuan dengan mempelajari program kegiatan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Ketidaksiuaian pelaksanaan program tahun anggaran 2012 salah satunya adalah melaksanakan program pelestarian dan pengelolaan kekayaan budaya, dengan indikator kinerja program pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, penerbitan literatur sekunder (katalog induk, bibliografi daerah dan daftar KCKR) dan pelaksanaan perbaikan koleksi deposit serta pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dan program perbaikan sistem administrasi kearsipan dan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan, peningkatan kualitas pelayanan informasi, dengan indikator kinerja program sosialisasi kearsipan di lingkungan SKPD kabupaten/kota dan swasta, menyusun hasil kajian sistem administrasi kearsipan, pelaksanaan penilaian, penyusutan dan pemusnahan arsip, pelaksanaan perawatan/pemeliharaan arsip inaktif dan melaksanakan apresiasi kearsipan, serta melaksanakan program bina sistem dan pengendalian perpustakaan, pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia perpustakaan.

Hasil wawancara kepada Kepala Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, diperoleh keterangan bahwa para aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan prinsip-prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan organisasi. Karena kelemahan utama aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat adalah masih lemahnya sumber daya aparatur dalam penguasaan ilmu di sektor perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, di samping itu perpustakaan masih belum menjadi bahan utama masyarakat dalam mencari informasi serta keterbatasan sarana prasarana penunjang untuk kegiatan kearsipan, perpustakaan yang belum tersedia

dengan lengkap, sehingga hal ini menghambat bagi pelaksanaan kegiatan kearsipan dan perpustakaan.

Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Bidang Arsip Dinamis dan Arsip Statis, diperoleh keterangan bahwa dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi, tentunya tidak terlepas dari faktor koordinasi antar masing-masing bidang. Karena aktivitas suatu organisasi selalu berkaitan dengan proses penyatu-paduan sasaran-sasaran dan kegiatan dari masing-masing bidang yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Oleh karena itu untuk meningkatkan responsibilitas aparatur pada Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat sangat memerlukan kegiatan koordinasi, agar semua bidang kerja yang ada mampu bergerak mengatasi permasalahan organisasi, seperti banyaknya acara di media elektronik yang membuat masyarakat lebih tertarik daripada membaca di perpustakaan dan sering hilangnya dokumentasi data di daerah.

Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat akan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuannya, karena tidak didukung oleh proses koordinasi yang efektif. Setiap bidang kerja yang ada harus mendukung bidang kerja lainnya agar kelancaran kerja dapat dipenuhi secara efisien dan tepat waktu. Penyelenggaraan kegiatan di bidang perpustakaan dan kearsipan memerlukan koordinasi yang terintegrasi dan terdapat suatu jalinan kerjasama dan komunikasi yang efektif. Sehingga setiap bidang yang ada saling tergantung untuk mengerjakan misi dan tugas badan dalam mengatasi permasalahan besarnya di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, baik mengenai pengelolaan koleksi deposit daerah, publikasi dan permasyarakatan perpustakaan, pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah, maupun penilaian dan penyusunan arsip.

Berdasarkan dari keterangan beberapa sumber data, dapat ditelaah bahwa setiap organisasi apapun bentuk dan jenisnya selalu berupaya mencapai tujuannya. Tujuan ini lebih dimungkinkan dicapai bila organisasi melaksanakan tugasnya melakukan hubungan-hubungan ke dalam dan keluar organisasi. Melihat Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat sebagai suatu sistem jelas sangat diperlukan kegiatan koordinasi. Karena dengan melalui koordinasi pada masing-masing bidang akan menciptakan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran program kerja.

C. Responsivitas Kinerja

Responsivitas kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi merupakan kesanggupan para aparatur dalam membantu dan menyediakan pelayanan informasi yang cepat, tepat serta tanggap terhadap keinginan masyarakat. Responsivitas kinerja aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat melalui para aparatur masing-masing bidang merupakan suatu dambaan bagi masyarakat baik untuk kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum. Tindakan petugas dalam memberikan pelayanan informasi tersebut, tercermin dari tersedianya layanan jasa arsip kepada jumlah pengguna jasa arsip, perangkat layanan dan jaringan informasi kearsipan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perpustakaan, diperoleh keterangan bahwa kesanggupan aparatur dalam melaksanakan tugas, tergantung sumberdaya aparatur itu sendiri dalam memberikan pelayanan informasi mengenai perpustakaan dan kearsipan. Akan tetapi, setelah dicermati secara mendalam bahwa petugas belum sepenuhnya menunjukkan kesanggupan membantu dan menyediakan pelayanan informasi secara cepat, tepat serta tanggap terhadap masyarakat, Hal tersebut terlihat dari terbatasnya jumlah pos layanan perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan, jumlah peminjam buku dan terbatasnya indaks pos layanan perpustakaan keliling.

Lebih lanjut Kepala Bidang Arsip Dinamis dan Arsip Statis memberikan

keterangan bahwa kemampuan aparatur dalam melaksanakan pendataan dan penataan dokumen atau arsip daerah masih terbatas. Hal tersebut terlihat masih belum mempunya dalam melakukan penghimpunan terhadap arsip-arsip dari masing-masing SKPD sebagai bentuk arsip daerah. Di samping itu frekuensi pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan mengenai kearsipan masih terbatas.

Aspek responsivitas kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi terlihat dari tingkat pelayanan informasi yang diberikan oleh aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, masih dirasakan relatif belum merata terhadap masyarakat. Hal tersebut terlihat dari tenggang waktu dalam memberikan pelayanan informasi, ketepatan dalam memberikan segala bentuk informasi kepada masyarakat. Di samping itu, masih belum terciptanya bentuk kerja sama dengan pihak swasta dalam hal pengembangan jaringan informasi kearsipan.

Responsivitas yang diberikan aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat dalam konteks penelitian ini adalah kemampuan petugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, khususnya dalam rangka melakukan pengelolaan koleksi deposit daerah, publikasi dan permasyarakatan perpustakaan, pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah, maupun penilaian dan penyusutan arsip.

Berdasarkan informasi dari beberapa subjek penelitian, dapat ditelaah bahwa responsivitas aparatur dalam melaksanakan tugas dilihat dari kemampuan aparatur, terlihat dari prioritas pelayanan informasi serta mengembangkan program-program pelayanan informasi yang berkaitan dengan bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat akan dilihat melalui keterkaitan antar program kegiatan dengan kebutuhan organisasi, daya tanggap petugas dalam menghadapi dan menyelesaikan hambatan-hambatan dalam melaksanakan program dan tersedianya wadah serta kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan saran atau keluhan. Secara singkat, mengukur daya tanggap para aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat terhadap harapan, keinginan dan aspirasi. Hal ini sangat diperlukan karena merupakan bukti kemampuan petugas untuk mengenali kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi.

Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur, sebagai wujud atau manifestasi dari responsivitas pelayanan informasi yang diberikan oleh petugas masing-masing bidang di Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat terhadap pelaksanaan akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan dan pelayanan publik. Karena pengukuran kinerja aparatur dalam melaksanakan kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing bidang indikator kegiatan yang telah ditetapkan.

Pemberian pelayanan kepada publik, maka aparatur dituntut memiliki kompetensi yakni kemampuan aparatur untuk mengetahui dan memenuhi proses pelayanan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Persoalan yang dihadapi masyarakat menuntut tanggung jawab aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan informasi secara rasional mengenai bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi. Acuan tanggung jawab aparatur yang digunakan harus berpola pelayanan pada kepuasan publik. Kesadaran aparatur tentang eksistensi publik yang dapat mempengaruhi eksistensi pelayanan, sehingga memunculkan sifat arogansi birokrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, diketahui bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh aparatur dalam pengembangan program adalah

merespon pengembangan dan perubahan perencanaan strategis sesuai dengan perkembangan perubahan lingkungan strategis dan perencanaan strategis yang dilaksanakan dengan dukungan penuh dari atasan dan segenap jajaran Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil wawancara dari beberapa subjek penelitian, dapat ditelaah bahwa responsivitas kinerja yang dilakukan aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan pelayanan informasi, belum sepenuhnya mewujudkan unsur-unsur yang berfungsi dalam memberikan pelayanan publik, diaplikasikan dengan melihat kemampuan aparatur dalam membentuk profesionalitas kinerja yang menunjukkan suatu tindakan pekerjaan yang berdampak positif bagi proses kerja dan perkembangan pribadi petugas. Bentuk tindakan tersebut dapat diwujudkan melalui kecakapan dan terampil melayani masyarakat sesuai tugas dan fungsi, agar dapat mempengaruhi kualitas pelayanan informasi mengenai perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi.

Responsivitas kinerja aparatur tentunya memperhatikan nilai kepentingan umum yang semakin tinggi, maka harus dihindari kemungkinan terjadinya keadaan seperti kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau kepentingan pribadi mengorbankan kepentingan umum. Tetapi, hal tersebut tidak berarti kepentingan umum di atas segala-galanya, sehingga tidak menghormati dan mengabaikan kepentingan pribadi serta cenderung mengorbankan kepentingan pribadi. Secara luas kepentingan umum menyangkut fasilitas yang disediakan oleh badan atau organisasi yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak dan unsur pengorbanannya tidak tampak. Sejalan dengan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan memenuhi kepentingan orang banyak yang disebut dengan pelayanan umum.

Kemudian hasil wawancara kepada masing-masing Kepala bidang pada Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, dapat diketahui bahwa perhatian yang diberikan oleh petugas dalam memberikan pelayanan informasi masih dihadapkan pada situasi dan kondisi yang dilematis, karena ada dua prinsip pelaksanaan tugas saling bertentangan yaitu di satu sisi sebagai abdi masyarakat yang berfungsi melayani secara sosial. Namun para aparatur melaksanakan tugas dan fungsi dengan memantau dan menyesuaikan secara terus menerus keselarasan kinerja antara Renstra Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat dengan RPJMD, sehingga mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Mentalitas aparatur yang tidak memiliki komitmen tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, turut pula memberikan andil besar dalam menghambat pencapaian tujuan program. Aparatur tentunya dapat melakukan komunikasi tentang visi dan misi yang terencana dan sistimatis ke seluruh masing-masing bidang, sehingga adanya komitmen seluruh aparatur atas pelaksanaan tugas pokok dan lebih mengarah pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Di samping itu, komunikasi juga perlu dilakukan kepada *stakeholders* (pengguna informasi), sehingga terciptanya sistim umpan balik, dalam arti pelayanan prima yang diberikan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta administrasi umum benar-benar bermanfaat bagi pengguna informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perpustakaan, diperoleh keterangan bahwa kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok, tanpa harus menunggu petunjuk dari atasan. Penggambaran ini sekaligus menunjukkan betapa masih lemahnya kemampuan diskresi dikalangan aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat. Fenomena ini merupakan indikasi rendahnya responsivitas kinerja yang dilakukan oleh aparatur dalam memahami tugas pokok yang diembannya terutama dalam merealisasikan indikator program masing-masing bidang.

Realita menunjukkan bahwa Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat merupakan penyedia bahan informasi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat. Informasi yang disampaikan berkaitan dengan perkembangan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, fungsionalisasi sarana dan kegiatan Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan administrasi. Pelayanan yang dilakukan aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat yang demikian perlu dipadukan dengan mengembangkan pelayanan yang efektif, efisien dan prima sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga memungkinkan aparatur badan dapat mampu bersaing dalam menghasilkan produk pelayanan yang bermutu.

Kinerja aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik perlu merancang dan membangun sistem pengukuran kinerja yang sistematis dan mempertimbangkan ketersediaan data dan pengorganisasian data kinerjanya. Di samping itu sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemampuan, kemampuan dan etose kerja tinggi yang ditujukan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Responsivitas kinerja aparatur dituntut memiliki kompetensi yakni kemampuan aparatur untuk melaksanakan tugas pokok. Persoalan yang dihadapi aparatur dalam melaksanakan pelayanan informasi belum menunjukkan kesamaan visi yang berorientasi pada pelayanan prima dan sosialisasi kebijakan pada tiap-tiap bidang masih terlihat lemah. Hal tersebut dapat membawa implikasi pada rendahnya pemahaman dan efektivitas pelayanan yang dilakukan aparatur. Berdasarkan analisis dapat diidentifikasi mengenai kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai visi dan misi yang telah disepakati.

Sementara itu terhadap indikator tingkat kepuasan kerja dari pegawai berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Kepala Bidang Perpustakaan, yaitu diperoleh informasi bahwa aparatur merasa puas bekerja di Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat. Namun ada hal-hal yang terkadang merasa kurang puas dengan mekanisme kerja yang diterapkan di dalam organisasi, Karena masih banyak aparatur yang belum diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan dalam penguasaan ilmu disektor perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi.

Dari beberapa keterangan tersebut, maka dapat ditelaah bahwa ada adanya rasa ketidak-puasan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bidang, berkaitan dengan mekanisme kerja yang dianggap belum adanya peningkatan pengembangan Sumber Daya Aparatur, seperti memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan khusus di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi. Rasa puas dari pegawai jelas akan mengakibatkan pegawai merasa bertanggung jawab dan merasa memiliki organisasi. Kemudian setiap pegawai diperlakukan sama, artinya semuanya pasti dilibatkan dalam kegiatan pemeriksaan dan itu berarti sama-sama memberi reward kepada pegawai yang kurang kontribusinya terhadap peningkatan kinerja aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat.

Dari hasil wawancara, maka dapat ditelaah bahwa responsivitas kinerja aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, bahwa responsivitas dapat diukur sejauhmana aparatur melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya. Hal tersebut tersebut jelas menunjukkan bahwa

keberhasilan Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat harus mempertimbangkan bukan saja sasaran badan tetapi juga mekanismenya mempertahankan diri dan mengejar sasarannya. Dengan kata lain penilaian responsivitas kinerja aparatur harus berkaitan dengan masalah sarana maupun tujuan-tujuan Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat.

Suatu organisasi dikatakan efisien manakala organisasi itu mampu mencapai nilai-nilai hasil yang nyata secara maksimum dengan pemakaian nyata. Dengan kata lain efisiensi memperhatikan masalah jumlah masukan (seperti sumber daya manusia dan dana) yang diperlukan untuk memperoleh tingkat keluaran yang ditentukan atau tujuan tertentu. Banyak sekali faktor yang menentukan efisiensi suatu organisasi. Faktor-faktor tersebut dapat meliputi biaya relatif tenaga kerja, produktivitas perjam pegawai, biaya bahan baku dan kemajuan teknologi. Efisiensi organisasi Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat akan dilihat dari ketersediaan dana operasional, lamanya waktu yang digunakan dalam melakukan tugas dan fungsi serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan program.

Penyelenggaraan tugas-tugas kegiatan program Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat hanya ditunjang dari penyediaan dana APBD Provinsi Kalimantan Barat. Namun demikian penyediaan dana APBD itu relatif kecil bila dibandingkan dengan beban tugas penyelenggaraan Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat. Indikator ketersediaan jumlah dana operasional Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, berikut ditampilkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, diperoleh keterangan bahwa ketersediaan dana operasional kegiatan program di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi masih sangat kecil jika harus dibandingkan dengan jumlah yang ada rasionya belum berimbang. Misalnya dalam bidang perpustakaan dan kearsipan yang *notabene* tugasnya menyangkut sekian banyak bidang tugas, dalam realisasinya hanya sekian bidang tugas kerja saja yang dilaksanakan, hal ini disebabkan karena keterbatasan penyediaan dana operasional pelaksanaan program kegiatan.

Aspek keuangan dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia, maka aspek penyediaan dana operasional pelaksanaan kegiatan program di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi baik itu yang bersumber dari dana rutin maupun pembangunan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengukuran responsivitas kinerja aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat. Pada kenyataannya Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat akan mengalami kesulitan memenuhi tujuan pencapaian program jika penyediaan dukungan dana operasional sangat terbatas sekali.

Keterbatasan dana operasional kegiatan program Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap lamanya waktu dan jumlah pegawai yang teribat dalam melaksanakan tugas. Secara otomatis hal ini akan berpengaruh terhadap bobot temuan yang akan dihasilkan, hasil temuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat berpengaruh terhadap kinerja aparatur. Dengan demikian memang ada pengaruh antara penyediaan dana dengan kinerja aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat.

Dari hasil wawancara kepada Kepala Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, maka dapat diperoleh keterangan bahwa kehandalan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok, dilihat dari tingkat efisiensi, dapat diukur dari input dan output kegiatan program yang dilaksanakan. Jumlah input ternyata tidak berbanding terbaik dengan output yang dihasilkan, kondisi demikian nampak pada indikator kinerja aparatur yang dilakukan pada tahun 2012 ternyata ada

beberapa program yang belum mencapai sasaran. Contoh belum tersosialisasikannya kearsipan di lingkungan SKPD Kabupaten/kota dan swasta, belum tersediannya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang memadai, belum terbinanya sistem kearsipan dan belum terpublikasinya kearsipan melalui media.

Hasil wawancara dari berbagai sumber, dapat ditelaah bahwa kendala aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan tugas pokok secara ideal, kinerja aparatur akan efisien, apabila pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menyediakan input, seperti biaya dan waktu. Demikian pula pada sisi output secara ideal harus dapat memberikan produk yang berkualitas, terutama dari aspek biaya dan waktu melaksanakan tugas. Berbagai perspektif dalam melihat kinerja aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat dilihat dari sisi responsivitas, memperlihatkan bahwa indikator-indikator program kegiatan yang dipergunakan dalam menyusun kinerja aparatur ternyata bervariasi.

Dilihat dari perumusan tujuan yang ada sebagaimana telah disebutkan pada deskripsi Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, tidak nampak tujuan yang menyangkut penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan, arsip dinamis, arsip statis dan bina sistem. Begitu pula dalam pembagian pekerjaan serta pelimpahan/pendelegasian wewenang belum nampak. Sementara itu pelaksanaan koordinasi baru sebatas pembentukan tim koordinasi proses pengelolaan dan pelayanan yang masih secara manual, sehingga masih banyaknya arsip yang belum terolah yang meliputi arsip insntansi, Pemilu, Pilpras dan Pilkada.

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa struktur yang ada membawa konsekuensi terhadap tingkat pemanfaatan pegawai yang sesuai dengan spesialisasi yang terdapat di dalam struktur organisasi. Sementara itu, apabila struktur organisasi dilihat dari tingkat pengendalian pegawai dalam pelaksanaan tugas, maka dengan struktur organisasi yang ada, maka tingkat pengendalian yang dilakukan oleh kepala badan terhadap pegawai tidak mendapat kesulitan karena kepala badan tidak secara langsung mengendalikan tetapi melalui kepala sekretariat (Sekretaris) atau para kepala bidang. Tetapi hal tersebut apabila dibandingkan dengan struktur yang matrik yang mengabungkan jalur vertikal dan horisontal, yang dikembangkan karena berbagai macam fungsi organisasi dan spesialisasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, maka tingkat hierarki akan minimal dan otoritas yang terdesentralisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat untuk mencapai misi dan tujuan program, mutlak harus dapat mengkoordinasikan program-program yang ada demi tercapainya misi dan tujuan program. Apabila melihat struktur organisasi yang ada, maka belum terlihat peran dari Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat seutuhnya, dan terkesan seolah-olah hanya menangani masalah perpustakaan semata sedangkan peran lainnya yang harus dilaksanakan belum nampak di dalam struktur organisasi tersebut.

Responsivitas kinerja aparatur Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dikaitkan dengan struktur organisasi yang dibentuk sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, jelaslah bahwa struktur organisasi Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat yang ada sekarang dapat mempengaruhi terhadap kegiatan organisasi dalam pencapaian misi dan tujuan program kegiatan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur, karena manusia adalah aktor utama setiap organisasi dimana dan apapun bentuknya. Sumber daya manusia ini dapat dilihat dari tersedianya pegawai baik secara kuantitas dan kualitas, tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai, dan tingkat kemampuan teknis yang dimiliki pegawai, yang akan dicoba diuraikan secara berurutan.

Sumber daya manusia dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai, sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa Pegawai atau aparatur pada Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi dalam pencapaian tujuan dan misi organisasi, tergantung jumlah pegawai dan kualitas pegawai, yang dilihat dari tingkat pendidikan formal, sikap mental pegawai dan spesialisasi tertentu yang dimiliki.

Berdasarkan hasil pengamatan dan data yang ada menunjukkan bahwa dari 116 pegawai di Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, tidak ada satu orangpun yang berlatar belakang pendidikan formal dari perpustakaan, dan kearsipan, padahal badan disamping mengelola bidang perpustakaan juga mengelola kearsipan, sehingga diperlukan pegawai yang mempunyai kemampuan yang bersifat teknis.

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Akuntabilitas yang memperlihatkan bahwa tingkat konsistensi kebijakan dan kegiatan badan belum sesuai dengan aspirasi masyarakat, tingkat kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparatur dan masyarakat baru sebatas pencapaian target belum sampai pada outcome, tingkat rehabilitasi terhadap kejelasan status pembagian tugas pokok antara bidang dengan Unit pelayanan Perpustakaan (UPT. Perpustakaan) belum optimal, sehingga adanya kesulitan dalam menentukan arah kebijakan, sampai pada pelaksanaan program kegiatan.
2. Responsibilitas yang memperlihatkan bahwa belum optimalnya peran masyarakat dalam pemberdayaan perpustakaan, masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang trampil di bidang perpustakaan dan kearsipan, belum sesuai antara perumusan misi dan tujuan organisasi dengan dinamika perubahan.
3. Responsivitas memperlihatkan bahwa masih adanya keluhan dari masyarakat tentang pelayanan informasi dan masih rendahnya apresiasi terhadap buku dan kebiasaan membaca masyarakat serta masih terbatasnya sarana, mulai dari peralatan/perengkapan, hingga ke ruang penyimpanan yang masih menyatu penggunaannya dengan ruang kerja.

2. Saran-saran

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu secepatnya menata perangkat peraturan dan penegakan hukum dalam rangka sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.
2. Untuk meningkatkan responsibilitas kinerja aparatur, maka Perlunya penataan kelembagaan pengelolaan sumber daya aparatur, dengan menyediakan sumber daya aparatur di bidang teknologi informasi dengan mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemberdayaan perpustakaan, sehingga dapat berkembang budaya baca masyarakat.
3. Untuk meningkatkan responsivitas kinerja aparatur, maka Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, memperluas jangkauan layanan perpustakaan dengan system pelayanan perpustakaan yang prima.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, Sri R. 2001. *Kinerja Penyuluhan Pertanian dalam pelaksanaan Tugas Pokoknya*. Bogor: Program Pasca Sarjana IPB.
- Atmosudirjo, Prayudi. 2002. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: PDDN.

- Bernardin, John, and Russel E. A. Joyce. 1998. *Human Resource Management. An Experiential Approach*.
- Darmawan. B. 2005. *Persepsi Penyuluhan Pertanian Terhadap Penilaian Kinerja*. Bogor: MMA IPB.
- Dwidjoesastro, Soenardi. 2002. *Materi Pokok Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Karunika.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Galang Printika.
- Faisal, Sanapiah. 2002. *Format-Format penelitian Sosial (Dasar-Dasar Aplikasi)*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Hariandja, Marihot. T.E. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Hasanusi. 2005. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Pegawai*. Pontianak: MM Untan.
- Higgins, J.M. 1970. *Organization Policy and Strategic Management*. Hinsdale: III. Dryden Press.
- Keban, T Yeremias. 2005. *Kinerja Organisasi Publik*, Yogyakarta: Fisipol- UGM.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1999. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: LAN.
- Mangkuprawira, T.S. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik.*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2001. *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Makalah Seminar Otonomi Daerah*. Batam: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).
- Moleong, Lexi J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nitisemito, Alex. 2001. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prawirosentono, S. 2004. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFPE.
- Ruky. 2002. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Erlangga.
- Tohardi, Ahmad. 2002. *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Bandar Maju.
- Siagian, Sondang, P. 2004. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Dokumen Pemerintah :

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang *Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang *Pemerintah Daerah*.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2008, tentang *Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat*
- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor 62 Tahun 2008, tentang *Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat*.